

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN KINERJA KEUANGAN
DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK
PADA PEMERINTAH KOTA PADANG**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Manajemen Pada Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



OLEH:

SILVIA MONARI

NIM. 99729

MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN KINERJA KEUANGAN
DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK
PADA PEMERINTAH KOTA PADANG**

SILVIA MONARI

**Pembimbing Utama Prof. Dr. H. Syamsul Amar, MS
Ko Pembimbing Drs. H. Ali Anis, MS**

**Program Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
email : silvia_monari@yahoo.co.id**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan daerah pemerintahan Kota Padang. 2) Pengaruh transparansi dan kinerja keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik pada pemerintahan Kota Padang. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif yang bersifat kausatif. Populasi penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang yang berjumlah 42 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Inspektorat. Teknik analisis data digunakan adalah analisis jalur dengan pengujian uji F dan uji t. Hasil penelitian ini menemukan bahwa : 1) Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah Kota Padang. Semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan akan meningkatkan kinerja keuangan daerah pada pemerintah Kota Padang. 2) transparansi dan kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah daerah Kota Padang. Semakin tinggi tingkat transparansi dan didukung oleh kinerja keuangan daerah yang tinggi pula tentunya akan meningkatkan akuntabilitas publik pada pemerintah daerah Kota Padang.

Kata Kunci : Transparansi, Kinerja Keuangan Daerah, Akuntabilitas Publik

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze: 1) The effect of transparency on the financial performance of government area of Padang. 2) The effect of transparency and financial performance of public accountability in the governance of the city of Padang. This type of research is quantitative research that is causative. The study population was working units (SKPD) of Padang, amounting to 42 SKPD which consists of the Department, Agency, Office, District and Inspectorate. The data analysis technique used is path analysis to test F test and t test. Results of the study found that: 1) Transparency significant effect on the financial performance of the government of Padang. The higher the level of transparency in financial management will improve the financial performance of the government of Padang. 2) transparency and financial performance of a significant effect on public accountability in the local government of Padang. The higher level of transparency and supported by the financial performance of the high anyway will certainly increase public accountability in the local government of Padang.

Keywords: Transparency, Performance Local Finance, Public Accountability

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya Tulis saya,Tugas akhir berupa tesis dengan judul “Pengaruh Transparansi Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kota Padang” adalah hasil karya saya sendiri
2. Karya Tulis ini murni gagasan,rumusan,dan penelitian saya sendiri,tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain,kecuali arahan dari pembimbing dan kontributor
3. Didalam Karya Tulis ini,tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan pada Kepustakaan
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat penyimpangan didalam pernyataan ini,saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini,serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan hukum yang berlaku

Padang, Februari 2016
Yang membuat pernyataan,



Silvia Monari
NIM. 99729

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia serta hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan pada penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Magister Manajemen (S2) Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan dorongan baik materil maupun moril dari berbagai pihak. Sehingga dengan itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Amar, M.S sebagai pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga dalam penulisan tesis ini.
2. Bapak Drs. H. Ali Anis, MS sebagai ko-pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan bagi kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yasri, MS selaku Direktur Program Magister Manajemen Universitas Negeri Padang yang juga memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

5. Bapak DR. H. Hasdi Aimon, M.Si, Bapak DR. Yulhendri, M.Si dan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.
6. Staf, karyawan, dan Dosen pada Program Magister Manajemen Universitas Negeri Padang, penulis aturkan banyak terima kasih atas dorongan, bantuan, dan pelayanan yang telah diberikan.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu, dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin membuat tesis ini menjadi lebih sempurna namun apabila masih terdapat kekurangan maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi pengelola keuangan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik hidayah-Nya pada kita semua. Amin.

Padang, Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	12
1. Akuntabilitas Publik.....	12
a. Pengertian Akuntabilitas Publik	12
b. Faktor-Faktor Mempengaruhi Akuntabilitas Publik.....	18
2. Transparansi	18
a. Pengertian Transparansi.....	18
3. Kinerja Keuangan Daerah	23
a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	23
b. Tolok Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	27

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah.....	29
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Konseptual	32
D. Hipotesis Penelitian	34
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Populasi Dan Sampel	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Defenisi Operasional.....	40
F. Instrumen Penelitian	41
G. Uji Validitas dan Reabilitas	42
H. Teknik Analisis Data	45
BAB IV. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Responden.....	54
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	59
C. Uji Asumsi Klasik	72
D. Analisis Jalur.....	74
E. Pengujian Hipotesis.....	82
F. Pembahasan	83
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	89

B. Saran	89
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1. Fenomena Kinerja Keuangan Daerah Kota Padang.....	7
3.1. Instansi Pemerintahan Kota Padang.....	37
3.2. Indikator Variabel Penelitian	41
3.3. Hasil Uji Validitas Kuesioner Penelitian	42
3.4. Hasil Uji Relibilitas.....	43
4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/Golongan	54
4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	55
4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
4.4. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
4.5. Jumlah Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja.....	57
4.6. Deskripsi Variabel Akuntabilitas Publik.....	58
4.7. Deskripsi Variabel Transparansi	63
4.8. Deskripsi Variabel Kinerja Keuangan Daerah.....	67
4.9. Hasil Uji Normalitas	70
4.10. Hasil Uji Homogenitas.....	71
4.11. Koefisien Jalur Sub Struktur I.....	72
4.12. Koefisien Jalur Sub Struktur II	75
4.13. Rekapitulasi Pengaruh Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen .	79

DAFTAR GAMBAR

2.1. Kerangka Konseptual Penelitian	34
3.1. Bagan Analisis Jalur.....	48
3.2. Bagan Analisis Jalur Sub struktur 1	49
3.3. Bagan Analisis Jalur Sub struktur 2	50
4.1. Bagan Hasil Analisis Jalur Sub Struktur 1	73
4.2. Bagan Hasil Analisis Jalur Sub Struktur 2	77
4.4. Bagan Hasil Analisis Jalur	78

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil uji validitas dan reliabilitas	93
2. Angket penelitian	100
3. Tabulasi data hasil penelitian	109
4. Hasil analisis deskriptif	116
5. Hasil uji asumsi klasik	120
6. Hasil analisis jalur	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam wacana otonomi daerah, akuntabilitas publik merupakan kata kunci. Tuntutan dilakukannya akuntabilitas publik karena masyarakat menghendaki pemerintah sebagai pengembal amanat bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya akan berkewajiban mengelola dana masyarakat dalam rangka menjalankan pemerintahnya. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyarakat dengan baik maka pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah haruslah berorientasi pada kinerja dengan memperhatikan konsep *value for money*.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Dalam *good governance* akuntabilitas publik merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah. Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Menurut Mardiasmo (2006:80) akuntabilitas publik adalah kewenangan pihak pemegang amanah (*agent*) memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic.

Untuk mewujudkan akuntabilitas publik dalam hal keuangan daerah salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun suatu laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan daerah. Dengan pelaksanaan tersebut maka publik dapat mengetahui kinerja keuangan dari pemerintah daerah serta akuntabilitasnya. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja *financial* pemerintah daerah.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa pada pemerintah Kota Padang terlihat beberapa fenomena-fenomena akuntabilitas publik diantaranya :

1. Program dan kegiatan belum terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan, seperti terlambatnya pelaksanaan tender atau pelelangan pengadaan barang dan jasa untuk program dan kegiatan di SKPD. Dimana terlihat bahwa adanya pimpinan instansi yang tidak tegas sehingga berpengaruh terhadap komitmen stafnya dalam menyelesaikan program dan kegiatan, selanjutnya juga terlihat bahwa masih kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang seperti pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
2. Permasalahan lain yang terlihat bahwa pemerintah daerah belum terlaksananya dengan baik pemberian penghargaan atau hukuman atas kinerja, dimana masih ditemukan ketidakjelasan antara wewenang dan tanggung jawab seperti Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dengan bendahara dikarenakan karena kurang memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing dan belum optimalnya penggunaan data secara menyeluruh dan lengkap sehingga mengakibatkan kurang tercapainya kinerja dengan baik karena sering terlambat penyampaian SPJ yang berdampak pada proses pelaporan kinerja sering kali terlambat.

Relatif rendahnya rendahnya akuntabilitas publik pada pemerintah daerah Kota Padang diduga atau disebabkan oleh banyak faktor. Penulis menduga bahwa faktor yang berkemungkinan paling dominan mempengaruhi akuntabilitas publik adalah transparansi dan kinerja keuangan daerah. Logikanya, semakin tinggi

tingkat transparansi dan didukung oleh kinerja keuangan daerah yang tinggi pula tentunya akan meningkatkan akuntabilitas publik pada pemerintah daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Dari laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diperoleh sejauhmana kinerja keuangan pemerintah daerah, apakah sudah transparan dan akuntabel. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga kinerja keuangan daerah akan menjadi lebih baik. Pertama, akuntabilitas karena dengan adanya standar akuntansi pemerintahan tersebut, pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN/APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena dengan adanya standar akuntansi pemerintahan, BPK menjadi lebih mudah menemukan tempat-tempat

sembunyi korupsi. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas publik dalam mengelola keuangan daerah, maka publik akan lebih mudah mengetahui penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan begitu pemerintah akan berusaha untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan menjadi lebih baik.

Pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat karena dana yang digunakan dalam penyediaan layanan berasal dari masyarakat baik secara langsung (diperoleh dengan mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri), maupun tidak langsung (melalui mekanisme perimbangan keuangan). Pola pertanggungjawaban pemerintah daerah sekarang ini lebih bersifat horizontal di mana pemerintah daerah bertanggung jawab baik terhadap DPRD maupun pada masyarakat luas (*dual horizontal accountability*). Namun demikian, pada kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada DPRD dari pada masyarakat luas.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Transparansi atau keterbukaan yang sangat diperlukan oleh publik adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang harus didukung oleh sistem akuntansi pemerintah yang mampu menyediakan informasi untuk tujuan pertanggungjawaban (*stewardship and accountability*), mengontrol dan pengawasan/pengendalian manajemen pemerintah daerah.

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR/DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Namun dari pengamatan awal yang penulis lakukan diketahui bahwa masih rendahnya tingkat transparansi pemerintah Kota Padang dalam mengelola keuangan daerah dengan adanya indikasi sebagai berikut :

1. Tidak adanya pengumuman kebijakan anggaran yang disusun oleh masing-masing SKPD
2. Dokumen anggaran tidak tersedia pada masing-masing SKPD
3. Laporan pertanggungjawaban disampaikan tidak tepat waktu
4. Belum terakomodasinya suara/usulan rakyat dalam kebijakan anggaran
5. Belum sistem pemberian informasi yang jelas kepada Publik sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai kebijakan anggaran keuangan yang disusun oleh pemerintah

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa idealnya pemerintah daerah harus memiliki kinerja yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat mewujudkan *good governance* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan berkaitan dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Padang, fenomena yang terjadi pada mekanisme penyusunan KUA Kota Padang antara lain; masih belum sama pemahaman SKPD, DPRD tentang KUA dan kaitanya dengan dokumen perencanaan lain sehingga belum terjadi keselarasan antara Renja yang diajukan oleh masing-masing SKPD dengan dokumen perencanaan sebelumnya seperti RPJM. Hal yang sama juga terjadi pada tahap pembahasan pada lembaga legislatif daerah (DPRD) Kota Padang yakni perumusan KUA berisikan daftar keinginan dari masing-masing anggota DPRD yang cenderung tidak berpedoman pada RPJM yang telah ditetapkan sebelumnya baik dalam bentuk kegiatan maupun waktu pelaksanaan kegiatan. Penetapan KUA masih sarat dengan tekanan politis baik dari *top management* maupun dari legislatif, sehingga penetapannya belum objektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya dari hasil observasi yang penulis lakukan terhadap 15 SKPD yang ada di Kota Padang melalui wawancara dengan pihak yang mewakili SKPD masing-masing 3 orang didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 1.1
Fenomena Kinerja Keuangan Daerah Kota Padang

No	Permasalahan	Jumlah	Persentase
1	Pendistribusian sumber daya (input) dalam melakukan pengelolaan keuangan tidak merata	9	20.00
2	Relatif rendahnya tingkat efisien dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi	11	24.44
3	Output dari program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan kurang sesuai dengan yang diharapkan	8	17.78

4	Outcomes dari program dan kegiatan sering kali tidak menjadi perhatian	10	22.22
5	Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD kurang dapat mencapai hasil yang diharapkan	7	15.56

Dari data di atas terlihat bahwa kinerja keuangan daerah Kota Padang masih jauh dari yang diharapkan yaitu adanya inidikasi sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pendistribusian sumber daya (input) dalam melakukan pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaan suatu program dan kegiatan kurang dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Tingkat efisien dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi juga belum terlaksana dengan baik sehingga kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi kegiatan belum tercapai sehingga pada akhirnya menyebabkan terjadi pembengkakan biaya dalam melaksanakan kegiatan dan program yang tentunya akan menurunkan kinerja pengelolaan keuangan.
3. Output dari program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan ada kalanya dalam pelaksanaannya tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga hal ini memperburuk citra pemerintahan Kota Padang di mata publik dalam melakukan pengelolaan keuangan, kemudian permasalahan lainnya yaitu ada output yang dihasilkan tidak berfungsi secara optimal seperti absen sidik jari sudah dibeli tapi sampai saat ini belum juga dioperasikan

4. Banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat bahwa outcomes dari program dan kegiatan sering kali tidak menjadi perhatian sehingga output yang dihasilkan tidak terpakai.
5. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD kurang dapat mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan dari program tersebut.

Fenomena di atas menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam melaksanakan program-program yang telah dirancang. Sehingga masyarakat pun menuntut pemerintah dan pihak-pihak terkait agar dapat transparan dan akuntabel dalam menjalankan program dan kegiatan yang berguna untuk kesejahteraan rakyat

Dari fenomena tersebut dapat kita lihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah masih banyak yang harus dibenahi. Banyak program-program kegiatan pemerintah yang belum berjalan dengan efektif. Untuk itu sangat diperlukan akuntabilitas serta transparansi agar program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah selaku lembaga perwakilan dari masyarakat seharusnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah agar keinginan dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat dapat terpenuhi. Kinerja keuangan daerah ini harus dapat lebih ditingkatkan demi terciptanya kemajuan kesejahteraan secara nyata dengan bekerja keras, dan menciptakan komunikasi tanpa curiga dengan masyarakat (publik).

Berdasarkan uraian di atas dan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam kinerja keuangan daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Transparansi dan Kinerja Keuangan Daaerah Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan daerah pemerintahan Kota Padang?
2. Sejauhmana pengaruh transparansi dan kinerja keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik pada pemerintahan Kota Padang?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok, maka secara spesifik penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan daerah pemerintahan Kota Padang
2. Pengaruh transparansi dan kinerja keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik pada pemerintahan Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas publik dalam kinerja keuangan daerah.
2. Bagi akademis, sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Negeri Padang.
3. Bagi Pemerintah, sebagai masukan dalam mewujudkan kinerja keuangan daerah yang baik dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah Kota Padang. Semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan akan meningkatkan kinerja keuangan daerah pada pemerintah Kota Padang. Penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi dan kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah daerah Kota Padang. Semakin tinggi tingkat transparansi dan didukung oleh kinerja keuangan daerah yang tinggi pula tentunya akan meningkatkan akuntabilitas publik pada pemerintah daerah Kota Padang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas publik menjadi lebih baik secara khusus harus dilakukan perbaikan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan perlu ditingkat kinerja pengelolaan keuangan daerah. Upaya yang dapat dilakukan berupa :
 - a. Semua SKPD harus memprioritas penggunaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang mendesak dan dibuthkan oleh masyarakat banyak

- b. Semua SKPD harus harus menyediakan informasi secara lengkap mengenai keuangan daerah yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan dan program agar pihak-pihak terkait dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah
 - c. Pemerintah daerah Kota Padang perlu meningkatkan kejelasan mekanisme pemeriksaan laporan keuangan
2. Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas publik adalah melakukan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan cara :
- a. SKPD di Kota Padang harus melaksanakan program dan kegiatan yang dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat
 - b. SKPD di Kota Padang perlu mencapai output penggunaan anggaran publik dengan kuantitas dan kualitas yang terukur
 - c. SKPD di Kota Padang harus perlu memanfaatkan berbagai informasi untuk menunjang keberhasilan anggaran berbasis kinerja

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya, Muhammad Firdiansyah dan Sudana, I Putu. (2015). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11.2 (2015): 611-628
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2007. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, UPP UMP YKPN, Yogyakarta.
- LAN. 2001. *Akuntabilitas dan Good Governace*. Jakarta: Erlangga
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- _____. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui <<http://www.google.co.id>>. Diakses tanggal [28/03/2009].
- 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Melalui <<http://www.google.co.id>>. Diakses tanggal [28/03/2009].
- Prasetyantoko. 2008. *Corporate Governance : Pendekatan Institusional*. Jakarta: Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. Vol. 2. No. 2. *Jurnal Akuntansi & keuangan*. Hal. 138-150
- Santoso, Singgih. 2002. *Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS*. Jakarta : Elex Media Komputindo